

Perspektif Kekuatan dalam Pekerjaan Sosial

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo

Abstrak

A lot of social issues generally approached the issue of problem-based approach (PBA) with a variety of other derivative terms, namely medical model, the deficit approach, or a more traditional approach. Problem-based approach to focus more on weaknesses in the client's self that causes problems, both at the micro, mezzo and macro levels. PBA is less attention to the potentials, aspirations, hopes and potential sources residing on the client and the client environment. Strength-based approach (strength perspective) as a perspective emerged in response to the previous approach. This approach started to pay attention to the potential, aspirations, expectations and resources that can be utilized within the framework of solving social problems. For the social work profession, this perspective provides a new angle to look at and address the social problems facing clients.

Keywords: *Problem Based Approach, Strength Perspective, Social Work*

Pendahuluan

Secara tradisional pekerjaan sosial telah lama menggunakan *Problem Based Perspective* atau *Deficit Approach* dalam penanganan masalah. Artinya intervensi Pekerjaan Sosial dalam mengatasi masalah, termasuk mengatasi kemiskinan, terfokus pada upaya mengatasi masalah atau kekurangannya. Bahwa secara tradisional para Pekerja Sosial menggunakan perspektif berbasis masalah ini dapat dipahami, mengingat “kelahiran Pekerjaan Sosial Profesional sangat dipengaruhi oleh ilmu kedokteran yang menggunakan “*diagnostic approach*” atau “*pathologist approach*”. Seperti halnya *diagnostic approach*, *Problem Based Perspective* atau *Deficit Perspective* ini memandang penyandang masalah dari perspektif masalah atau kekurangan yang ada pada penyandang masalah. Asesmen yang dilakukan sebagai langkah awal pemecahan masalah terfokus pada permasalahan atau kekurangan serta kebutuhan klien, oleh karenanya *treatment* yang dilakukan terfokus pada mengatasi masalah atau kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada tahap *Assesment*. Perspektif ini terus berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya para Pekerja Sosial masih menggunakan perspektif tersebut.

Pada dua dekade terakhir muncul perspektif baru, yaitu “*Strengths Perspective*”. Perspektif ini memfokuskan pandangannya terhadap penyandang masalah pada sisi kekuatan yang ada pada penyandang masalah, bukan pada masalah atau kekurangan. Perspektif ini memandang bahwa “setiap orang mempunyai sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka yang belum dimanfaatkan” (Saleeby dalam Graeme Stuart, 2012: 1) Dalam melaksanakan intervensi terhadap klien, Pekerja Sosial memfokuskan pada kekuatan yang ada pada klien, daripada masalah, kekurangan, dan hal-hal yang bersifat patologis (Chapin, 1995; Early & GlenMaye, 2000; Saleebey, 1992d; Weick et al., 1989, dalam Graeme Stuart, 2012: 1). *Treatment* yang dilakukan adalah mendayagunakan kekuatan-kekuatan klien yang dihasilkan dari asesmen, bukan mengatasi masalah klien. Perspektif ini muncul sebagai kritik terhadap praktik Pekerjaan Sosial yang menggunakan *Problem Perspective* atau *Deficit Perspective*. Penganut perspektif berbasis kekuatan ini berpendapat bahwa “pemecahan dengan menggunakan *Problem Perspective* atau *Deficit Perspective* tidak menghasilkan perubahan yang sustainable (Mount Royal University, 2011: 1) dan menciptakan ketergantungan pada sumber daya dan pemecahan masalah dari luar dirinya (Laura Ellis and Elaine Weekse, 2011: 1).

Sebagai contoh dalam konteks penanggulangan kemiskinan, perspektif berbasis kekuatan ini berpandangan, bahwa orang miskin itu mempunyai kekuatan, mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kehidupannya. Salah satu prinsip dari perspektif ini adalah “*Every individual, family, group and community has strengths, and the focus is on these strengths rather than pathology*” (Natalie Scerra, 2011: 3). Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka asesmen terhadap orang miskin difokuskan pada kekuatan-kekuatan yang pada pada diri orang miskin tersebut. *Treatment* yang dilakukan tentunya difokuskan pada pendayagunaan kekuatan-kekuatan yang ada pada orang miskin sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen. Hal ini berbeda dengan *treatment* yang menggunakan *Problem Perspective* atau *Deficit Perspective* yang terfokus pada penanggulangan masalah atau mengatasi kekurangan yang ada pada orang miskin sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen. Artinya perbedaan perspektif tentang kemiskinan ini akan berdampak adanya perbedaan fokus asesmen antara kedua. Perbedaan fokus asesmen akan berdampak pada perbedaan fokus *treatment*-nya atau pemecahan masalahnya.

Sejarah Perspektif Berbasis Kekuatan

Seperti halnya profesi lain, profesi Pekerjaan Sosial juga telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah pergeseran perspektif dalam memandang masalah yang dihadapi klien. Perubahan perspektif terhadap masalah, tentu berdampak pada perubahan berbagai aspek dalam pemecahan masalah, misalnya metode, teknik-teknik, bentuk-bentuk kegiatan yang digunakan, dan lain-lainnya. Perubahan atau pergeseran perspektif itu adalah pergeseran dari perspektif berbasis masalah (*problem-based perspective*) ke perspektif berbasis kekuatan (*strengths-based perspective*)

Perspektif berbasis masalah atau *problem based perspective* ini disebut juga “*the deficit approach, the problem-based approach*”. Perspektif ini digunakan dalam praktik Pekerjaan Sosial sejak “kelahiran” profesi ini. Perspektif ini terus digunakan oleh para Pekerja Sosial dalam menangani masalah sampai dengan munculnya perspektif berbasis kekuatan. Perspektif berbasis masalah adalah cara pandang Pekerja Sosial dalam menangani masalah yang terfokus pada masalah-masalah atau kekurangan dan kebutuhan kliennya. Dengan perspektif ini tindakan-tindakan pertolongan yang dilakukan Pekerja Sosial terfokus pada tindakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan kliennya.

Perspektif berbasis masalah ini sering disebut juga “*pathologist approach*”, karena pengaruh pendekatan yang digunakan dalam praktik kedokteran, yang memang menggunakan pendekatan patologis atau “*diagnostic approach*”. Secara historis kelahiran Pekerjaan Sosial sebagai profesi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh praktik kedokteran, karena “dibidani” oleh seorang dokter (Mary Richmond). Perspektif berbasis masalah ini kemudian secara tradisional mendominasi praktik pemberian pertolongan yang dilakukan para Pekerja Sosial.

Dalam perjalanan praktiknya, muncullah pemikiran-pemikiran baru yang mengkritisi perspektif berbasis masalah. Pemikir-pemikir baru ini menilai bahwa perspektif berbasis masalah mempunyai berbagai kelemahan. Laura Ellis and Elaine Weekse mengemukakan bahwa perspektif berbasis masalah dipandang tidak efektif untuk menghasilkan perubahan perilaku yang *sustainable*, bahkan menumbuhkan ketergantungan klien terhadap sumber-sumber di luar dirinya (2011: 1). Menurut Laursen (2003) pendekatan *deficit* akan memberikan dampak turunya motivasi dan

aspirasi untuk unggul (dalam Maryann Roebuck, 2007: 5). Mereka juga mengkritik perspektif berbasis masalah karena, perspektif ini menyebabkan terjadinya:

- *Labeling, and therefore limiting options*
- *Obscuring the recognition of a person's unique capabilities and strengths*
- *Focusing on the "can'ts" as opposed of the "cans"*
- *Ignoring potential resulting from adversity*
- *Prescribed programming—as opposed to individualized*
- *Looking for patterns, such as broken homes, dysfunctional neighborhoods, and poverty, to explain difficulties*
- *Lacking credibility to clearly show cause versus effect*

(Wayne Hammond, 2010:1)

Dengan perspektif patologis, diagnosis sering kali menghasilkan label dalam mendefinisikan masalah klien. Labeling ini sering kali memiliki makna negatif yang sangat kuat di dalam masyarakat, sehingga sering membahayakan orang. Yang paling rentan adalah orang miskin, minoritas, perempuan, imigran. (Morley D. Glicken, 2011: 48). Label ini memiliki kekuatan tidak hanya untuk menjelaskan, tapi ternyata juga membatasi dan menyempitkan peluang klien untuk merealisasikan kehidupan yang lebih berarti (Clay Graybeal, 2001: 237). Karena itulah, sudah saatnya memandang orang miskin dari sisi yang lain, yaitu sisi positif atau sisi kekuatan dari orang miskin. Memandang orang miskin dari sisi kekuatan akan menghilangkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan labeling bagi orang miskin tersebut.

Kita seringkali keliru memberikan persepsi terhadap orang miskin. Kita sering kali berpikir bahwa orang-orang miskin itu senantiasa menunggu uluran tangan kita, menunggu bantuan kita, menunggu amal kita, padahal pikiran kita ini tidak selalu benar. "Secara keseluruhan orang miskin tidak mencari amal kita; mereka mencari kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan tenaga mereka untuk memperbaiki keadaan mereka" (John, 2011). Mereka adalah orang-orang yang selalu mencoba berusaha untuk memperoleh sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja, kemampuan dan kesempatan yang tidak mampu mereka capai menyebabkan secara sasat mata seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang hanya dapat menunggu bantuan atau tindakan amal orang lain. Oleh karena itu, sudah saatnya persepsi terhadap orang miskin ini diubah. Dalam ungkapan yang lebih prospektif Prahalad (2009) mengemukakan "*Jika kita berhenti memandang orang miskin sebagai korban atau beban dan mulai mengenali mereka sebagai pengusaha yang tangguh dan kreatif, sebuah dunia baru berpeluang akan terbuka*". Lebih lanjut Prahalad mengemukakan bahwa orang miskin bukanlah pengurus sumber daya dari orang-orang kaya di dunia ini. Mereka itu dapat menjadi sumber inovasi dan pada akhirnya justru menjadi mesin perputaran perdagangan global dan kemakmuran.

Kritik-kritik ini kemudian menghasilkan munculnya perspektif berbasis kekuatan, meskipun perspektif ini tidak serta merta mendominasi perspektif dalam praktik Pekerjaan Sosial. Kapan perspektif berbasis kekuatan ini muncul dalam praktik intervensi Pekerjaan Sosial? Sebetulnya sulit mengetahui waktu kelahiran perspektif ini. Sebelum perspektif berbasis kekuatan ini dinyatakan, sudah ada beberapa pendekatan yang sangat mirip dengan perspektif berbasis kekuatan, seperti "*development resilience*", "*healing and wellness*", "*solution focused therapy*", "*asset-based community development*". (Dennis Saleebey, 2002). Istilah-istilah tersebut merupakan wujud dari pergeseran cara berpikir para pekerja

sosial dalam memandang permasalahan yang dihadapi kliennya. Perspektif berbasis kekuatan atau “*the strengths-based perspective*” itu sendiri mulai digunakan sejak tahun 1980.

Bahwa perspektif berbasis kekuatan memandang penyandang masalah dari masalahnya tetapi dari kekuatannya, bukan berarti perspektif ini menyangkal adanya masalah. “*It is important to understand the strengths-based approach is not about denying that people do experience problems and challenges and these issues do need to be taken into consideration of a more holistic approach*”. (Wayne Hammond, 2010:1). Dalam bahasa yang lain Saleebey mengemukakan bahwa “*perspektif kekuatan bukan berarti meninggalkan sama sekali model medik atau patologis. Schizophrenia adalah nyata. Kekerasan seksual adalah nyata*” (Dennis Saleebey, 2001:233). Demikian pula, kemiskinan itu nyata. Perspektif berbasis kekuatan tidak menolak adanya kenyataan bahwa orang mengalami kemiskinan. Perspektif ini hanya melihat sisi atau dimensi lain dari penyandang masalah.

Berbeda dengan perspektif berbasis masalah, perspektif berbasis kekuatan lebih memfokuskan pada kekuatan dan sumber daya. Perspektif ini meyakini bahwa setiap orang, tanpa kecuali, mempunyai asset internal dan eksternal, kompetensi, serta sumber daya (Dennis Saleebey, 2000: 127). Kedua perspektif tersebut memperlihatkan perbedaan cara pandang terhadap orang yang bermasalah dibandingkan dengan orang yang “tidak bermasalah”. Perspektif berbasis masalah memandang bahwa “seseorang itu bermasalah, sedangkan orang lain tidak bermasalah”. Ada *labelling* yang dikenakan kepada orang bermasalah. Di sisi lain, perspektif berbasis kekuatan memandang bahwa “seorang yang bermasalah itu mempunyai kekuatan, sedangkan orang yang tidak bermasalah juga mempunyai kekuatan”. Tak ada label atau setidaknya-tidaknya ada label yang sama yang dikenakan kepada orang yang bermasalah.

Pergeseran perspektif pemecahan masalah telah terjadi dalam praktik Pekerjaan Sosial dari perspektif berbasis masalah (*deficit perspective atau problem perspective*) ke perspektif berbasis kekuatan (*strength perspective*).

This paradigm can influence one's view of all behavior, and have a profound effect on how services are provided, especially through the dichotomization of all behavior into medical and non-medical polarities, and through the mechanism of insurance coverage and reimbursement (Berlin, 1992; Kirk & Kutchins, 1992)

Paradigma tersebut dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap perilaku, dan berdampak pada bagaimana layanan disediakan, terutama melalui dikotomi semua perilaku terbagi menjadi medis dan non medis, dan melalui mekanisme layanan asuransi dan kompensasi (Berlin, 1992; Kirk & Kutchins, 1992).

The fundamental premise is that individuals will do better in the long run when they are helped to identify, recognize, and use the strengths and resources available in themselves and their environment. This seems harmless enough, but as the author and his colleagues have witnessed, this simple idea can be seen as very threatening by some (Clay Graybeal, 2001: 234)

Perspektif kekuatan dapat dikatakan sebagai suatu metode khusus dalam bekerja bersama dengan klien serta berdasarkan pengalaman-pengalaman klien dalam mengatasi masalah-masalahnya. Hal ini bukan berarti mengabaikan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang dialami. Bah-

kan lebih dari itu, yaitu berupaya mengidentifikasi hal-hal positif berdasarkan sumber-sumber yang berada di seputar klien serta keterampilan-keterampilannya sebagai pijakan untuk mengatasi berbagai persoalan.

Prinsip-Prinsip Perspektif Berbasis Kekuatan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pekerjaan Sosial lahir dengan didasari oleh perspektif berbasis masalah yang patologis. Dalam perjalanannya para praktisi maupun akademisi Pekerjaan Sosial telah banyak mengembangkan teori maupun praktik dengan berbasis pada masalah. Pekerjaan Sosial berkembang sebagai profesi “pemberian pertolongan”.

Social work has constructed much of its theory and practice focusing on deficits, problems, pathologies, and diseases (Minuchin et al., 1998; Lawrence, 2004; Seligman & Darling, 2007). Throughout its history, social work has been seen as a problem-solving profession. In other words, the foundation of social work during the past hundred years has been the traditional problem-solving model, sometimes called a “positivistic”, “deficit” or “medical model” (Berg, 1994; de Jong & Berg, 2002a; Healy, 2005). This model, rooted in cultural and belief systems, arose in the field of medicine in the late 19th and early 20th centuries and has been the dominant paradigm of practice in the helping profession. In the problem-solving paradigm, the specialist as the “expert” usually designs the solution (Berg & Kelly, 2000: 15).¹

Teori-teori dan metode-metode, pendekatan, dan lain-lain dengan basis masalah ini telah menjadi dasar praktik pekerjaan sosial selama ini. Hingga awal abad ke 20 basis masalah yang menjadi dasar perspektif dalam pengembangan teori maupun metode Pekerjaan Sosial ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam dunia kedokteran selama ini yang didominasi pendekatan patologis, sampai munculnya perspektif baru, yaitu perspektif berbasis kekuatan. Perspektif berbasis kekuatan memandang bahwa pendekatan yang terfokus pada masalah dapat menghilangkan kekuatan-kekuatan yang ada pada keluarga, sumber daya, serta motivasi untuk berubah.

Dalam implementasinya perspektif berbasis kekuatan ini menggunakan suatu prinsip. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa “individu-individu akan berperilaku baik di masa depan ketika mereka dibantu untuk mengidentifikasi, mengenali dan menggunakan kekuatan-kekuatan dan sumber daya-sumber daya yang tersedia dalam diri mereka sendiri dan dalam lingkungan mereka” (Graybeal, Moore, & Cohen, 1995). Kekuatan dari perspektif kekuatan ini sebetulnya juga berasal dari nilai-nilai yang ada pada Pekerjaan Sosial itu sendiri, seperti “*Self determination, empowerment, worth and human dignity*”. (Cummins, Sevel, & Pedrick, 2006).

The strengths perspective as a philosophical principle of social work practice emanates from social work values: self-determination (the act of giving clients the freedom to make choices in their lives and to move toward established goals in a manner that they see as most fitting for them), empowerment (lays the groundwork for informed self-determination), inherent worth and dignity (a core value of the profession is respect for every human being’s) (Cummins, Sevel, & Pedrick, 2006).

¹ <https://sites.google.com/site/solutionfocusedapproach/5-study-materials/2-strengths--based-approach-definition-history-philisophy-principles-and-practice>.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa perspektif kekuatan merupakan amanah, sekaligus dasar filosofis dari profesi pekerjaan sosial. Salah satunya adalah pada prinsip hak untuk menentukan atau memutuskan dirinya sendiri. Klien diberi peluang dan kesempatan untuk memikirkan dan menentukan jalur hidupnya sendiri berdasarkan potensi dan sumber yang dimilikinya. Kebebasan untuk bertindak menentukan arah hidup berdasarkan potensinya tersebut juga dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan pada diri klien. Hal ini dapat dipandang penghargaan dan menghormati atas segala sumber dan potensi yang dimiliki oleh seseorang, termasuk juga keluarga dalam kategori miskin

Pendekatan berbasis kekuatan saat ini, secara pustaka telah menggeser pendekatan intervensi yang berlandaskan pada 'kesalahan' atau 'masalah'. Pendekatan kekuatan akan lebih fungsional, karena berlandaskan pada kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber daya baik dari diri maupun lingkungan sekitar. Persoalannya adalah bagaimana diri atau keluarga tersebut dapat mengetahui dan memahami berbagai sumber dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam diri dan lingkungan sosialnya. (Sousa, Ribeiro & Rodrigues, 2006: 190-191)

Selanjutnya Hammond (2010: 5) telah mengidentifikasi, bahwa para peneliti dan praktisi telah mengembangkan prinsip-prinsip utama atau inti (*Core Principles of Strength-Based Practice*) dalam praktik berbasis kekuatan. Pengembangan prinsip-prinsip utama tersebut ditujukan untuk memberi arah dan memandu dalam penerapan praktik berbasis kekuatan. Terdapat 9 (sembilan) prinsip utama dalam praktik dan penelitian berbasis kekuatan, yaitu:

- 1) *An absolute belief that every person has potential and it is their unique strengths and capabilities that will determine their evolving story as well as define who they are-not their limitations (not, I will believe when I see—rather, I believe and I will see).*
- 2) *What we focus on becomes one's reality—focus on strength, not labels—seeing challenges as capacity fostering (not something to avoid) creates hope and optimism.*
- 3) *The language we use creates our reality—both for the care providers and the children, youth and their families.*
- 4) *Belief that change is inevitable—all individuals have the urge to succeed, to explore the world around them and to make themselves useful to others and their communities.*
- 5) *Positive change occurs in the context of authentic relationships—people need to know someone cares and will be there unconditionally for them. It is a transactional and facilitating process of supporting change and capacity building—not fixing.*
- 6) *Person's perspective of reality is primary (their story)—therefore, need to value and start the change process with what is important to the person—not the expert.*
- 7) *People have more confidence and comfort to journey to the future (the unknown) when they are invited to start with what they already know.*
- 8) *Capacity building is a process and a goal—a life long journey that is dynamic as opposed to static.*
- 9) *It is important to value differences and the essential need to collaborate—effective change is a collaborative, inclusive and participatory process—“it takes a village to raise a child”. (Hammond, 2010:5)*

Menurut Saleebey (1997: 12-15), terdapat lima prinsip yang mengarahkan asumsi perspektif kekuatan tersebut, pertama, setiap individu, kelompok, keluarga dan masyarakat memiliki kekua-

tan. Perspektif kekuatan melihat sumber-sumber tersebut. Saleebey mencatat bahwa di tahap akhir, klien ingin mengetahui bahwa anda benar-benar membantu mereka, bahwa bagaimana melihat diri anda berbeda, bahwa anda akan mendengarkan mereka, bahwa anda akan menghargai diri mereka tidak peduli latar belakang mereka, dan bahwa anda yakin bahwa mereka dapat membangun sesuatu yang bernilai dengan sumber-sumber yang ada dalam diri dan di sekitar mereka. Tetapi yang terpenting, klien ingin mengetahui bahwa anda yakin bahwa mereka dapat mengatasi kemalangan dan mulai menapaki ke arah perubahan dan pertumbuhan.

Kedua, trauma, siksaan, sakit, dan perjuangan dapat membuat luka, tetapi hal tersebut dapat dijadikan sumber tantangan dan kesempatan/peluang. Klien yang telah menjadi korban dipandang sebagai individu aktif dan berkembang, melalui trauma, mereka belajar keterampilan dan atribut pengembangan diri yang membantu mereka menghadapi persoalan yang sama di masa mendatang. Kehormatan akan ditemui ketika mampu mengatasi hambatan-hambatan. Kita akan cepat tumbuh berkembang apabila kita mampu melewati krisis dan mampu mengatasi situasi secara efektif di setiap periode kehidupan.

Ketiga, diasumsikan bahwa anda sama sekali tidak mengetahui batas atas dari kapasitas untuk terus tumbuh dan berubah, dan melakukan aspirasi individu, kelompok dan masyarakat secara serius. Prinsip ini berarti bahwa pekerja sosial harus memegang harapan yang tinggi terhadap klien dan mengikatnya dengan visi, impian, dan nilai-nilainya. Individu, keluarga, dan masyarakat memiliki kapasitas untuk memantulkan dan memulihkan persoalan. Ketika pekerja sosial menghubungkannya dengan harapan dan impian klien, klien secara tepat memiliki keyakinan yang lebih besar. Sehingga seterusnya mereka mampu menempatkan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan dan impian mereka sendiri.

Keempat, kita lakukan pelayanan terbaik kepada klien dengan berkolaborasi bersamanya, yang menciptakan potensi lebih besar akan dirinya sendiri. Seorang pekerja sosial akan lebih efektif jika dilihat oleh klien sebagai kolaborator atau konsultan daripada sebagai seorang ahli atau seorang profesional. Sikap mental kolaboratif oleh seorang pekerja sosial membuat dia lebih rentan dengan beragam akibat kelemahan dari hubungan *expert-inferior*, termasuk pemolaan, *victim-blaming*, dan pesolek pandangan klien.

Kelima, setiap lingkungan penuh dengan sumber-sumber. Dalam setiap lingkungan (tidak peduli seberapa kerasnya) terdapat individu-individu, kelompok-kelompok, asosiasi, dan institusi dengan sesuatu untuk pemberian, dan dengan sesuatu kebutuhan lainnya mungkin menyedihkan. Perspektif kekuatan berupaya meng-identifikasi sumber-sumber tersebut dan membuat mereka keberadaannya bermanfaat bagi individu, keluarga, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut begitu esensial penerapannya, khususnya berkaitan dengan proses awal pertolongan pekerjaan sosial, yaitu asesmen. Hasil dari asesmen ini akan ditentukan bersama (antara pekerja sosial dan klien) mengenai rencana kegiatan (*plan of treatment*) yang sekiranya tepat sesuai dengan sumber-sumber dan potensi yang dimiliki klien dan yang ada di sekitar klien. Namun, sebelum berlanjut perlu pula untuk melihat suatu kerangka asesmen, yang telah ada dan berkembang baik yaitu asesmen dengan kerangka bio-psiko-sosio-spiritual'; yang mencoba untuk secara menyeluruh melihat beragam dimensi dalam asesmen.

Penutup

Pendekatan praktik berbasis kekuatan berlandas pada suatu keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan unik serta terus berkembang. Fokus pada kekuatan berarti melihat tantangan sebagai kapasitas untuk terus membina dengan menciptakan harapan dan optimisme. Dalam realitas keseharian, hal tersebut dapat muncul dalam berbahasa dengan membiasakan bahasa dan cara-cara yang memunculkan potensi mereka. Sikap menghargai dan memfasilitasi merupakan tindakan-tindakan riil yang harus terus diupayakan. Konsekuensinya, lingkungan sosial sekitar harus mendukung suasana penguatan perspektif berbasis kekuatan.

Pekerjaan Sosial dapat dikatakan sebagai profesi yang kelahirannya sangat terkait dengan permasalahan kemiskinan, khususnya upaya membantu orang-orang yang menyandang masalah kemiskinan ini. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai “major problem” bagi profesi ini. Pada awalnya Pekerjaan Sosial menggunakan perspektif berbasis masalah dalam menjalankan intervensinya membantu memecahkan masalah kemiskinan. Perspektif ini mendominasi intervensi yang dilakukan oleh para Pekerja Sosial hingga tahun 1980an. Sejak itu terjadi pergeseran perspektif dalam intervensi Pekerjaan Sosial yang ditandai dengan muncul perspektif berbasis kekuatan. Intervensi Pekerjaan Sosial mulai difokuskan pada upaya mendayagunakan sumber-sumber daya atau kekuatan yang pada penyandang masalah, termasuk orang miskin, baik internal maupun eksternal.

Bibliografi

- Akhmadi, 2006, Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- BPS, 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010, Berita Resmi Statistik, BPS, No.45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, Jakarta.
- Causes & Effects of Poverty On Society, Children & Violence poverties.org Research for social & economic development-See more at: <http://www.poverties.org/effects-of-poverty.html#sthash.IFOQKxdi.dpuf> *Published March 2011 - Updated May 2013:8)*
- Francis, Tazoacha, 2001, The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development in Africa, A Paper Presented at The Conference “Poverty and Sustainable Development “ Held In Bordeaux, France from November 22-23, 2001
- Graeme Stuart, 2012, What is Strengths Perspective, Sustaining Cummunity
- Laura Ellis and Elaine Weekse, 2011, Why Use a Strengths-Dede Approach Instead of a Deficit-Based Approach?, www.mtroyal.ca/cs/groups/public/.../pdf_why_strengths_not_deficit.pdf
- Maia Green, Representing poverty and attacking representations: some anthropological perspectives on poverty in development
- Maryann Roebuck, 2007, The Strength-Based Approach : Philosophy and Principles for Practice,
- Natalie Scerra, 2011, Strength-Based Practice, The Evidence, a Discussion Paper, Research-Paper July 2011, Uniting Care Children, Young People, and Families, New South Wales)
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights *Principles and Guidelines for Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies* [online] Available at , <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf> > [Accessed 10 January 2012] (Poverty Social Work Policy Institute <http://www.socialworkpolicy.org/research/poverty.html> 2feb2013)
- Raharjo, S.T. 2016. Asesmen dan Wawancara dalam Praktik Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Unpad Press: Bandung.
- _____. 2015. Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial. Unpad Press: Banung
- _____. 2015. Keterampilan Pekerjaan Sosial: Dasar-dasar. Unpad Press: Bandung.
- Schiller, Bradle R. 1998, The Economics of Poverty sn Discrimination, 7th edition, Prentice Hall. New Jersey.
- Tammie O’Nei, 2006, Human Rights and Poverty Reduction: Realities, Controversies and Strategies, An ODI Meeting Series (editorial), Overseas Development Institute 2006.
- The World Bank , 2001, World Development Report 2000/2001, Attacking, © 2001 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A.
- , 2009, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009, Berita Resmi Statistik BPS, No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009 , Jakarta.
- United Nations, 1995, World Summit for Social Development, Copenhagen, Denmark, www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm, *diunduh 25agustus2015*

- , 2013, The Millennium Development Goals Report. New York,
<https://sites.google.com/site/solutionfocusedapproach/5-study-materials/2-strengths--based-approach-definition-history-philisophy-principles-and-practice>
- Wibhawa, B., Raharjo, S.T., Santoso., M.B. 2015. Pengantar Pekerjaan Sosial. Unpad Press: Bandung

Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon

Wanodyo Sulistyani dan Soni A. Nulhaqim

Abstrak

Debt bondage is a relation pattern between Bakul (the capital owner) and Langgan (fishers who are indebted to Bakul) in Gebang Mekar Village, Cirebon District. This debt bondage are imperishable because the lack of Langgan's ability to pay their debt to Bakul; while Bakul as the capital owner has power to determine the price of fish and other fisheries products, where the fishers have obligation to sell their harvest to their Bakul. Yet, Bakul's price is lower than the market price. As a result, to increase the fishers' profit, they sold their harvest to other Bakul; this behavior is potentially raised a conflict between fishers and their Bakul also among Bakul. Study of Criminology explained the relation between the powerful and the powerless in making law in their favor. Unfair law has encouraged the powerless to breaking the law, and creating conflict. In this article, initially, the lack of fishers' welfare related to the role of the state will be reviewed; next, the criminology theories which explain about violation and the causes of conflict will be outlined; furthermore, the relation between Bakul and Langgan in Gebang Mekar Village, Cirebon District will be described; lastly, potential conflict that arise because of Bakul and Langgan relation will be analyzed with criminology theories.

Keywords: *Conflict, social Relation, Fishery Community*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan potensi hasil laut yang melimpah serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yakni 99.093 kilometer berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) (Yandi Mohammad, Berita Agar diakses 10 Desember 2016). Jika dilihat kondisi geografis, data empirik tentang luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia (Prasetyono, 2016). Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan nelayan yang masih rendah dan lekat dengan kemiskinan.

Salah satu permasalahan yang utama terkait dengan kemiskinan yang dialami oleh nelayan adalah masalah kepemilikan modal. Minimnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk melaut serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, memaksa nelayan untuk terjerat hutang dengan tengkulak. Penjeratan hutang ini membuat nelayan tidak memiliki kuasa untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga yang semestinya, melainkan mengikuti harga dibawah pasaran yang telah ditentukan oleh tengkulak.

Penjeratan hutang ini juga dialami oleh nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, yang dilakukan oleh Bakul terhadap Langgan. Bakul adalah istilah yang dipakai di Desa Gebang Mekar untuk tengkulak atau orang yang memberikan hutang modal kepada nelayan; sedangkan Langgan adalah nelayan yang berhutang kepada Bakul.

Berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, mayoritas penduduk di Desa Gebang Mekar adalah nelayan. Berdasarkan Profil Desa, peruntukan lahan terbesar yaitu sebesar 115.745 hektar dari 242.615 hektar digunakan untuk pertambakan, karena lokasinya yang berbatasan dengan laut (Profil Desa Gebang Mekar, 2015). Sehingga di sini masyarakatnya mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Desa Gebang Mekar berada pada tingkat pendidikan tidak tamat Sekolah

Dasar atau dengan kata lain tidak bersekolah. Berdasarkan data Angkatan Kerja (Usia 18-56 tahun), tingkat pendidikan di Desa Gebang Mekar menunjukkan dari total 5.078 orang 2.032 orang (40%) tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 1.270 orang (25%) tamat SD, dan sisanya, 1.778 (35%) orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Mayoritas dari penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya saat ini berprofesi sebagai nelayan, buruh, dan pedagang (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).

Tidak adanya modal ditambah dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, telah melanggengkan pola relasi penjeratan hutang antara Bakul dan nelayan. Dalam banyak kasus, Langgan tidak mampu untuk membayar hutang kepada Bakul, sehingga tidak dapat lepas dari jeratan hutang ini. Bahkan, hutang yang dimiliki Langgan kepada Bakul bersifat turun temurun (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).

Disini seharusnya negara berperan untuk membantu para nelayan untuk dapat terbebas dari jeratan hutang yang dilakukan oleh Bakul. Peran negara ini menjadi sangat penting guna mencegah timbulnya konflik yang dapat terjadi karena ketidakadilan yang dialami oleh nelayan; serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di dalam masyarakat serta ketimpangan dalam hal kekuasaan. Terkait dengan peran negara untuk menjembatani perbedaan kepentingan tiap-tiap individu di dalam masyarakat, Thomas Hobbes melalui ide "*social contract*" (kontrak sosial), dimana di dalamnya merupakan pemikiran mengenai relasi hukum, masyarakat dan Negara, mengemukakan bahwa "Setiap orang setuju untuk merelakan "sebagian haknya" kepada Negara (George B Vold, dkk, 2002: 16). Selanjutnya Negara menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan kontrak tersebut melalui upaya penegakan hukum, antara lain dalam bentuk penghukuman terhadap pelanggaran hukum yang telah disepakati tadi.

Disini jelas bahwa negara harus berperan dalam menangani setiap kejadian konflik atau mencegah terjadinya konflik. Sebagai upaya untuk membebaskan Langgan dari jeratan hutang, sebenarnya negara telah memberikan sarana dengan mengatur mengenai pinjaman modal ke bank dan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Namun nelayan yang umumnya adalah buruh nelayan tidak memiliki jaminan untuk dapat meminjam modal ke bank. Selain itu, tidak berperannya KUD juga semakin melanggengkan pengikatan hutang antara Bakul dan Langgan. Sehingga salah satu cara untuk membayar hutangnya, Langgan biasanya mengandalkan anaknya atau sanak saudaranya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri, yang mana ini juga hanya dapat dilakukan oleh hanya sedikit warga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana pola relasi kekuasaan antara Bakul dan Langgan dapat memicu ketidakadilan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik.. Kekuasaan akan memberikan pengaruh dalam hal pembentukan hukum/aturan dan menentukan perilaku yang dianggap menyimpang, serta reaksi terhadap penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan Teori kontrol dan konflik menguraikan bagaimana kekuasaan pemilik modal akan menekan kelompok-kelompok *power-less* melalui aturan/kebijakan yang mereka bentuk, yang pada gilirannya akan memaksa kelompok untuk memberontak atau menyimpang dari aturan yang dibuat oleh pemilik modal. Disinilah konflik terjadi di dalam masyarakat.

Tulisan ini pertama akan menguraikan penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dikaitkan dengan peran negara. Berikutnya, akan diuraikan teori-teori yang menjelaskan penyimpangan perilaku dan timbulnya konflik. Selanjutnya, pola relasi antara Bakul dan Langgan di Desa

Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon akan digambarkan. Terakhir, akan diuraikan analisis terhadap pola relasi Bakul dan Langgan serta potensi konflik yang dapat timbul dari pola relasi tersebut.

Kajian Relasi Kekuasaan dan Penyimpangan Perilaku

Kejahatan dapat didefinisikan secara beragam, berdasarkan hukum, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana sebagai tindak pidana dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Sedangkan pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan. Hubungan kekuasaan dan upaya kelompok dominan untuk membatasi keberagaman manusia baik keberagaman bahasa, pengalaman, serta budaya merupakan fokus dari kajian kejahatan berdasarkan pendekatan keberagaman manusia (Rob White and Fiona Haines, 2001 : 5).

Teori-teori yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah teori kontrol (*control theory*) dan teori konflik (*conflict theory*). Pada dasarnya kedua teori tersebut hendak menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan serta faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kejahatan.

Teori kontrol ini beranjak dari kajian mengapa seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal ini karena kejahatan adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia secara alami. Menurut teori ini, manusia melakukan kejahatan bukan karena kuatnya dorongan yang memaksa mereka untuk melakukan kejahatan, melainkan karena lemahnya kekuatan yang menahan mereka untuk tidak melakukan kejahatan. Teori kontrol terdiri dari *personal control* (kontrol individu) dan *social control* (kontrol sosial). Menurut Reiss, kontrol individu menjelaskan mengenai kemampuan seseorang untuk dapat menahan dirinya untuk tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan aturan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kontrol sosial secara luas meliputi antara lain kontrol langsung seperti pembatasan atau penghukuman, kontrol internal melalui kesadaran, kontrol tidak langsung melalui hubungan dengan orang tua dan orang-orang yang taat hukum, serta ketersediaan cara-cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan. Nye berargumen bahwa (George B Vold, dkk, 2012 : 117-179).

“jika kebutuhan individu dapat dipenuhi secara layak tanpa ada penundaan, tanpa melanggar hukum, maka tidak akan ada kejahatan, dan kontrol internal, tidak langsung, dan langsung yang minimum telah cukup untuk membuat orang mengikuti aturan”

Jika teori kontrol membahas mengenai bagaimana seseorang tidak melakukan kejahatan, kajian teori konflik membahas mengenai bagaimana kejahatan terbentuk dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan. Menurut Vold, proses pembentukan hukum dan pengendalian kejahatan adalah refleksi dari konflik antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, dimana masing-masing kelompok mencoba untuk meloloskan suatu aturan untuk kepentingan mereka dan untuk memperoleh kontrol atas polisi.

Konflik sosial adalah hal yang selalu hadir di dalam masyarakat. Konflik ini dapat berpotensi menjadi sesuatu yang merusak (*destructive*) atau sesuatu yang membangun (*constructive*), tergantung apakah ini akan membuat hancurnya struktur sosial atau akan membawa pada perubahan yang positif bagi ketertiban sosial. Orang-orang yang memiliki kekuasaan akan mengendalikan kebutuhan dan pelayanan masyarakat, polisi, ekonomi, politik, dan ideologi (keyakinan dan nilai-nilai).

Mereka akan membuat hukum yang akan menghukum beragam perilaku dalam rangka membentuk seluruh institusi sosial bahkan seluruh budaya (Freda Adler, dkk, 1997 : 198). Jadi hukum dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Relasi Antara Bakul dan Langgan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon

Nelayan adalah profesi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Gebang Mekar. Berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, jumlah nelayan adalah 665 KK dan Buruh (Tani, nelayan, dll) adalah 390 KK dari 1.787 KK. Profesi ini digeluti karena melihat pada letak geografis desa yang berbatasan langsung dengan laut, yakni sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga pemanfaatan terbesar lahan adalah untuk pertambakan yaitu sebesar 115.745 hektar dari 242.615 hektar.

Menjadi wiraswasta/pedagang adalah profesi yang juga banyak ditekuni warga selain nelayan, yakni sebanyak 432 KK (Profil Desa Gebang Mekar, 2015). Jenis usaha yang biasa dilakukan adalah sebagai pengepul ikan/hasil tangkapan nelayan yang biasa disebut dengan Bakul/bandar. Para Bakul ini biasanya telah memiliki pelanggan tetap atau nelayan yang secara tetap menjual hasil tangkapannya kepada Bakul. Hal ini terjadi karena para nelayan ini yang biasanya disebut dengan Langgan memiliki hutang kepada Bakul.

Umumnya Langgan yang terikat hutang dengan Bakul akan sulit untuk lepas dari jeratan hutang tersebut. Bahkan seolah-olah ini adalah hutang seumur hidup. Meskipun, Bakul menyatakan bahwa hutang Langgan akan dianggap selesai apabila Langgan meninggal dunia, namun fakta berbeda diberikan oleh masyarakat bahwa hutang Langgan ini diwariskan kepada sanak saudara atau anak-anaknya untuk melunasinya.

Dalam beberapa kasus, Langgan berhasil lepas dari Bakul, meskipun jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Umumnya, mereka yang terlepas dari hutang ke Bakul adalah dengan meminjam uang ke bank atau salah satu anggota keluarganya ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan melunasi hutang Langgan kepada Bakul. Meskipun pinjaman ke bank dapat membantu nelayan untuk lepas dari jerat hutang ke Bakul, namun untuk meminjam uang ke Bank tidaklah mudah karena diperlukan adanya jaminan. Sedangkan, umumnya nelayan di Desa Gebang Mekar adalah buruh nelayan. Artinya mereka tidak memiliki barang/benda yang dapat dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke bank. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD) yang seharusnya dapat berfungsi untuk membebaskan nelayan dari jeratan hutang ini tidak berfungsi. Ditambah lagi, pada umumnya nelayan akan berfoya-foya pada saat mereka mendapatkan hasil laut/hasil tangkapan yang banyak. Hal ini disebabkan karena umumnya mereka berpikir bahwa besok mereka akan melaut dan akan mendapatkan hasil kembali, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhannya karena telah disediakan oleh alam dan mereka tinggal mengambilnya saja.

Untuk membayar hutang kepada Bakul, umumnya antara Bakul dan Langgan akan bagi hasil atas hasil tangkapan tersebut. Disini Langgan diharuskan untuk menjual hasil tangkapannya kepada Bakul tersebut dengan harga yang ditentukan oleh Bakul, yang umumnya dibawah harga pasar. Sehingga dalam beberapa kasus, Langgan menjual hasil tangkapannya tidak kepada Bakul yang meminjamkannya modal, namun menjualnya kepada Bakul lain, dengan harapan bahwa harga yang ditawarkan lebih tinggi.

Apabila Bakul yang meminjamkan modal kepada Langgan ini mengetahui perbuatan Langgan yang menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lain, maka Bakul ini akan meminta Bakul lainnya yang menerima hasil tangkapan Langgannya untuk melunasi hutang Langgan tersebut. Istilah yang digunakan untuk ini adalah pindah Bakul. Namun, umumnya antar Bakul telah menyepakati bersama besaran harga beli hasil tangkapan nelayan; sehingga, pindah Bakul-pun tidak memperbaiki kondisi kehidupan ekonomi sosial dari nelayan.

Umumnya konflik yang terjadi antara Bakul dan Langgan adalah persetujuan antar istri/ibu-ibu. Di Desa Gebang Mekar, umumnya yang menjadi Bakul adalah perempuan/istri, laki-laki/suami hanyalah sebagai penyedia modal, sedangkan yang menjalankan bisnisnya adalah istrinya. Begitu juga dengan Langgan, segala urusan dilakukan oleh perempuan/istri karena suaminya melaut. Sehingga, konflik terjadi antar istri, namun tidak pernah berdampak meluas/sampai dengan antar suami berkelahi/berseteru (Soni A Nulhaqim, dkk).

Analisa Potensi Konflik Antara Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon

Untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, maka terdapat dua pranata strategis yang dapat menjelaskannya. Kedua pranata tersebut adalah pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Sifat eksploitatif dari kedua pranata sosial ekonomi tersebut telah menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan (Andhika Rakhmanda : 2016).

Berdasarkan pandangan struktural, kemiskinan dapat dilacak kembali dari faktor-faktor struktural yang melekat, seperti ekonomi dan/atau beberapa lingkungan institusional yang saling berkaitan yang menguntungkan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu saja dibandingkan dengan kelompok lainnya, umumnya didasarkan pada gender, kelas, atau ras. Didalam masyarakat nelayan, kemiskinan struktural terbentuk karena ada perbedaan ekonomi/kelas, yakni terkait dengan masalah kekuasaan dari pemilik modal yang dalam hal ini adalah tengkulak.

Kemiskinan terbentuk karena adanya eksploitasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan melalui pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Merujuk pada konsep dasar dari teori Marxis yang dikemukakan oleh Karl Marx, pola relasi yang terjadi adalah relasi produksi, yaitu relasi antara pemilik sarana produksi dan kelas pekerja atau proletar (Gregory Jordan, 2004 : 22), dimana disini kelas pekerja akan dieksploitasi guna menjaga kemampuan pemilik modal untuk berkompetisi di pasar. Perilaku Bakul yang mewajibkan Langgan yang berhutang padanya untuk menjual hasil tangkapannya kepada Bakul dengan harga dibawah harga pasar, menunjukkan eksploitasi yang dilakukan oleh Bakul sebagai pemilik modal terhadap Langgan.

Modal yang digunakan Bakul untuk menjalankan bisnisnya akan semakin bertambah dengan keuntungan yang diperolehnya dari membeli hasil tangkapan Langgannya dengan harga murah. Keuntungan yang menjadi modal ini akan digunakan oleh Bakul untuk membeli perahu/alat tangkap atau untuk memperbaiki perahunya/alat tangkapnya agar dapat melaut ke tempat-tempat diluar wilayah kabupaten Cirebon serta untuk meminjamkan modal kembali kepada Langgan. Semakin bertambahnya jumlah kapal/alat tangkap dan semakin canggihnya kapal/alat tangkap yang dimiliki oleh seorang Bakul akan membuatnya mampu berkompetisi dengan Bakul lainnya, dan memiliki Langgan yang semakin banyak.

Kebutuhan modal seorang nelayan untuk melaut atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama Langgan tersebut melaut semakin melanggengkan relasi penjeratan hutang yang dilakukan oleh Bakul terhadap Langgan. Minimnya kemampuan Langgan untuk membayar hutang akan membuat Langgan terus menerus tergantung kepada Bakul. Disini Bakul akan terus mengeksploitasi Langgan melalui penetapan harga ikan/hasil tangkapan.

Lebih lanjut, penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh Bakul dapat berpotensi menimbulkan konflik, karena ketidakadilan yang dirasakan oleh Langgan/nelayan. Quinney berpendapat bahwa kejahatan (penyimpangan) didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan (berkonflik) dengan kepentingan kelompok tertentu di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik (Tim Newburn : 252-253). Mereka akan membuat hukum yang akan menghukum beragam perilaku dalam rangka membentuk seluruh institusi sosial bahkan seluruh budaya (Freda Adler, dkk : 198). Jadi hukum dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Bakul di dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Gebang Mekar memiliki peran yang sangat signifikan. Bakul-lah yang menentukan pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Antara Bakul dan Langgan, sebenarnya tidak ada perjanjian tertulis bahwa Langgan harus menjual hasil tangkapannya kepada Bakul yang meminjamkan modal kepadanya, bahkan Bakul mengistilahkan bagi hasil untuk melunasi hutang Langgan, namun dalam praktiknya Langgan di Desa Gebang Mekar memiliki kewajiban untuk menjual hasil tangkapannya kepada Bakul tersebut. Harga dibawah pasaran yang ditetapkan oleh Bakul telah membuat Langgan menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lain dengan harapan akan memperoleh keuntungan lebih besar. Tentu saja perilaku ini dianggap menyimpang oleh si pemilik modal.

Perilaku Langgan yang menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lainnya merupakan bentuk perlawanan dari Langgan yang menolak ketentuan penetapan harga oleh Bakul. Bentuk perlawanan terhadap nilai atau aturan ini merupakan akar dari teori konflik. Konflik dapat ditemukan dimana-mana, pada saat masyarakat sepakat dengan suatu nilai (konsensus), namun kenyataannya masih banyak perlawanan terhadap nilai tersebut (yang perilakunya dianggap sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai yang disepakati). Menurut teori konflik, hukum atau aturan tidak dibuat untuk kepentingan kolektif, sebagaimana dalam teori konsensus, melainkan hukum atau aturan tersebut merepresentasikan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum atau aturan. Sehingga kunci utama dari teori ini adalah kekuasaan (Freda Adler, dkk : 196).

Penetapan harga beli sepihak merepresentasikan bahwa kepentingan Bakul untuk mendapatkan keuntunganlah yang diutamakan. Meskipun, Bakul memiliki resiko pada saat meminjamkan modal kepada Langgan, seperti misalnya apabila ternyata Langgan tidak mampu membayar hutang, karena misalnya akibat perompakan di laut, dan/atau rusaknya kapal/alat tangkap.

Sebagai dampak aturan yang dibuat dianggap tidak adil telah membuat Langgan menjual sebagian hasil tangkapannya ke orang lain. Hal ini menunjukkan karena tidak sebandingnya posisi Bakul dan Langgan, dimana dalam hal ini Bakul memiliki kekuasaan yang lebih dalam memberikan modal dan menentukan harga hasil tangkapan, dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkannya secara sepihak. Oleh karena masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya, maka benturan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Bakul semakin besar dengan tidak berfungsinya KUD untuk membantu Langgan lepas dari jeratan hutang. Padahal sebagai salah satu pilar perekonomian, KUD

memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional (Ika, 2016). Pemenuhan kebutuhan anggotanya merupakan dasar utama usaha koperasi, khususnya kebutuhan yang terkait dengan mata pencaharian anggotanya Anna Fatchiya dan Istiqlaliyah Muflikhati, 2006 : 52). Di beberapa daerah dimana mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan, KUD ini memiliki unit-unit usaha yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan nelayan yakni seperti unit usaha pelelangan ikan maupun unit usaha simpan pinjam. Namun, KUD tidak berfungsi secara optimal di Desa Gebang Mekar, bahkan tidak berfungsi sama sekali (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).

Selain melalui KUD, nelayan dapat meminjam modal kepada bank. Namun, meskipun bank memberikan bantuan modal untuk nelayan, akan tetapi umumnya para nelayan ini tidak memiliki barang yang dapat digunakan untuk jaminan, akibatnya para nelayan memilih untuk meminjam ke Bakul. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya potensi konflik dapat nyata menjadi konflik.

Nye berargumen bahwa “jika kebutuhan individu dapat dipenuhi secara layak tanpa ada penundaan, tanpa melanggar hukum, maka tidak akan ada kejahatan, dan kontrol internal, tidak langsung, dan langsung yang minimum telah cukup untuk membuat orang mengikuti aturan” (George B Vold, dkk :79). Kondisi nelayan di Desa Gebang Mekar, yang umumnya masih mengandalkan peran Bakul, menunjukkan bahwa nelayan belum memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Perilaku (yang dianggap) menyimpang dengan menjual hasil tangkapan kepada Bakul lainnya tidak akan terjadi apabila Bakul membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang layak. Kondisi sosial ekonomi yang tereksplorasi oleh Bakul, telah menyebabkan nelayan melakukan upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, upaya-upaya tersebut seringkali dianggap melanggar pranata yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, yaitu Bakul.

Nelayan yang cenderung untuk memperoleh keuntungan dengan lebih besar dengan melakukan penyimpangan, dianalisa sebagai kegagalan individu untuk membangun *healthy super ego* serta kegagalan kontrol sosial untuk mengefektifkan aturan yang ada. Menurut Reckless, terdapat faktor pendorong (*push factor*) dan penarik (*pull factor*) yang menyebabkan individu melakukan penyimpangan (Katherine S Williams : 368). Faktor pendorong bagi nelayan adalah faktor psikologis individu (faktor internal), kemiskinan dan minimnya kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya (faktor eksternal), sedangkan faktor penarik antara lain adalah adanya sarana untuk melakukan kecurangan, yakni dengan adanya Bakul yang mau membeli hasil tangkapan mereka.

Memperhatikan uraian di atas, suatu perbuatan dinyatakan sebagai penyimpangan dalam pola relasi antara Bakul dan Langgan, semata-mata hanya dari sudut pandang pemilik kekuasaan, yang dalam hal ini adalah pemilik modal/Bakul. Namun, perilaku Bakul yang menetapkan harga beli hasil tangkapan nelayan di bawah harga pasar, serta kewajiban untuk Langgan menjual hasil tangkapannya kepada Bakul, tidaklah serta merta dianggap sebagai penyimpangan; padahal perilaku itu menunjukkan adanya penjeratan hutang kepada Langgan.

Keterbatasan kesempatan untuk nelayan menjual hasil tangkapannya telah menuntun nelayan untuk melanggar kesepakatan dengan menjual sebagian hasil tangkapannya ke orang lain. Hal ini sesuai apabila kita melihat definisi kejahatan dari pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*). Pendekatan ini menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan. Hubungan kekuasaan dan upaya kelompok dominan untuk membatasi keberagaman manusia baik

